

RENCANA KERJA (RENJA)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA METRO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah RENJA OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro untuk Tahun 2025.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun untuk menjadi acuan pedoman dasar dan pegangan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dan Pemerintah Daerah Kota Metro pada umumnya. Hal ini dimaksudkan nantinya agar tidak terjadi kerancuan dan pertentangan dengan program-program pembangunan daerah yang telah digariskan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan hati yang terbuka kami memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan, saran dan keritiknya demi perbaikan dimasa mendatang dengan harapan buku ini nantinya dapat dipergunakan bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuannya.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO,

Dra. ROSITA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700315 199003 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	44
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah	45
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelahaan Ususlan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	65
3.3 Program dan Kegiatan.....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	85
BAB V PENUTUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di Kota Metro tidak terlepas dari kondisi stabilitas politik serta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Situasi ini pada hakikatnya akan dapat tercapai apabila adanya upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun pertama sejak berdirinya pemerintah Kota Metro, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro telah menyusun berbagai program pembangunan untuk memantapkan situasi kondisi politik, ketentraman dan ketertiban di daerah. Juga memantapkan keberadaannya sebagai sebuah instansi. Seluruh program pembangunan telah dilakukan secara terencana dan bertahap berdasarkan analisa situasi, kondisi dan potensi sosial politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah. Juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun antara lain yaitu Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik kepada unsur Ormas, Legislatif, Orpol, LSM, Aparatur Pemerintah, Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar. Selain itu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro juga dilakukan peningkatan kualitas aparatur seperti pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2025 ini kegiatan yang semakin ditingkatkan adalah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Pembentukan FKUB Kecamatan dan keikutsertaan dalam perencanaan pelaksanaan keagamaan serta penyuluhan peredaran minuman keras dan narkoba,

dan juga dilaksanakan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan prekusor narkotika.

Pentingnya penyesuaian strategi pembangunan Kota Metro dikarenakan penyesuaian program kepala daerah, juga karena kondisi sosial politik daerah dan nasional dalam beberapa tahun terakhir menjalani perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap dinamika pembangunan pada Pemerintah Kota Metro, oleh karena itu penyesuaian strategi yang dilakukan disamping sebagai kelanjutan dan penajaman sasaran pembangunan yang ada juga merupakan perluasan dan penyempurnaan dari strategi. Pembangunan sebelumnya seperti yang tergambar dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan, perbaikan dan penyempurnaan strategi disusun secara sistematis melalui tahapan yang konsisten dan berkesinambungan, prosesnya yang dilakukan sesuai dengan karakteristik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya pendukung lainnya.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Metro dan hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan maka disusulah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun 2021 – 2026.

Kemudian Renstra ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang diinginkan dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Metro, agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat meningkat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor : 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
15. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 119/352/SJTahun 2017 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kota Metro 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
20. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 tahun 2021 tentang Rencana Starategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

- Negeri serta perkiraan indikatif perencanaan pendanaannya.; dan
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 dengan isu-isu strategis dan/atau pergeseran prioritas.pada tahun berjalan.

Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi perangkat daerah, swasta dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD maupun sumber pembiayaan APBN dengan tetap memperhatikan RKPD dan dokumen perencanaan Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat;
- b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Memberikan gambaran tentang kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri baik dalam konteks regional maupun nasional dan untuk memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
- d. Memudahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro dengan cara menyusun program dan kegiatan.
- e. Memudahkan bagi kepala badan dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dari progam serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Renja berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 yang mengacu pada RKPD dan dokumen perencanaan Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran singkat Kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, hal-hal yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi dilapangan dalam penyusunan program. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dasar hukum penyusunan Renja berisi tentang landasan-landasan normatif yang dijadikan dasar acuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro serta sistematika penyusunan Renja yang berisi alur pikir tahapan-tahapan penyusunan Renja.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Bab ini membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja pada tahun yang lalu, capaian Renstra dan analisis kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Pada Bab ini juga membahas mengenai isu-isu penting mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun lalu dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dan realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini membahas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja serta program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang dituangkan dalam

bentuk matrik-matrik juga menjelaskan indikasi sumber pendanaan yaitu kegiatan yang bersumber dari APBD serta menjelaskan lokalitas kewenangan dan kewilayahan yang berisi tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, program dan kegiatan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah lain serta program dan kegiatan kewilayahan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini membahas program dan kegiatan yang menjelaskan tentang :

1. Telaahan terhadap program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang dituangkan dalam bentuk matrik-matrik
2. Menjelaskan indikasi sumber pendanaan yaitu kegiatan yang bersumber dari APBD serta menjelaskan lokalitas kewenangan dan kewilayahan yang berisi tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah lain serta program dan kegiatan kewilayahan.
3. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
4. Uraian garis besar mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan
5. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
6. Penjelasan mengenai anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025 dan perkiraan maju tahun anggaran 2026.

Bab V. Penutup

Pada Bab ini membahas tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja badan tahun berikutnya, Renstra sebagai dasar dalam menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan serta harapan kedepan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Berisikan uraian penutup, yaitu :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Kesesuaian antar bab dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro TA 2025 ini menjadi langkah demi tercapainya perencanaan pembangunan daerah di Kota Metro TA 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 secara umum menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program / kegiatan / sub.kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada Tahun 2023 [Tahun n-2] dan perkiraan target tahun berjalan tahun 2025 (Tahun n-1). Pentingnya evaluasi, monitoring dan pengendalian ini diperlukan sebagai bahan penilaian apakah program / kegiatan / sub.kegiatan tersebut telah berhasil mencapai target indikator capaian yang telah ditentukan pada saat perencanaan.

Penetapan indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub,kegiatan

1. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang telah dilaksanakan berjumlah 6 (enam) program, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah 6 (enam) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dengan jumlah 5 (lima) sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dana Rp. 7.748.000,- hasil capaian -
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan dana Rp. 7.100.000,- hasil capaian -
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKAP - SKPD dengan dana Rp. 7.100.000,- hasil capaian -
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana Rp. 7.800.000,- hasil capaian -
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana Rp. 13.012.000,- hasil capaian -

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah 3 (tiga) Sub Kegiatan :

- Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana Rp. 2.872.314.990,- hasil capaian -
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan dana Rp. 550.500.000,- hasil capaian -
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan dana Rp. 7.260.000,- hasil capaian -

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan dana Rp. 17.380.000,- hasil capaian -

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah 6 (enam) Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan dana Rp. 6.000.000,- hasil capaian -

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana Rp. 51.085.000,- hasil capaian -
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana Rp. 80.182.500,- hasil capaian -.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana Rp. 26.389.000,- hasil capaian -
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan dengan dana Rp. 13.140.000,- hasil capaian -
 - Penyediaan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana Rp. 79.089.000,- hasil capaian –
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Dana Rp. 2.550.000,- , hasil capaian -.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana Rp. 45.059.460,- , hasil capaian -
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan dana Rp.102.130.000,- , hasil capaian -
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana Rp Rp.8.280.000,- , hasil capaian -
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana Rp. 10.000.000,- , hasil capaian -
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggak Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan dana Rp.56.201.400,- hasil capaian - .
 - Pelaksanaan Koordinasi Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggak Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan dana Rp.16.500.000,- , hasil capaian -
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggak Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan dana Rp. 35.811.600,-, hasil capaian –
 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka dengan dana Rp. 377.400.800,- hasil capaian –
 - Pembentukan Paskibraka dengan dana Rp. 622.599.200,- hasil capaian –
 - Pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka dan duta pancasila dengan dana Rp. 0,-
 - Pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila dengan dana Rp. 0,-
 - Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila dengan dana Rp. 73.500.000,- hasil capaian -
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan :
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah , dengan dana Rp. 40.426.100,-, hasil capaian -
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan dana Rp. 44.141.000,- , hasil capaian -
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan dana Rp. 55.690.700,-, hasil capaian -

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan dana Rp. 1.346.881.200,- ,hasil capaian -

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan dana Rp. 46.732.500,- ,hasil capaian -
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan dana Rp. 38.893.000,- , hasil capaian -

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Dana Rp. 38.666.400,- ,hasil capaian -
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Dana Rp. 44.381.600,- , hasil capaian -

f. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi dan Penanganan Konflik Sosial dengan 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Dana Rp. 62.987.400,- ,hasil capaian -
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Dana Rp. 0,-
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Dana Rp. 86.477.300,- , hasil capaian -
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan Dana Rp. 1.175.494.300,- ,hasil capaian -
2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota pada :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah.
[Nihil]
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

[Nihil]

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

[Nihil]

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

[Nihil]

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

[Nihil]

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

[Nihil]

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

[Nihil]

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

[Nihil]

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

[Nihil]

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - [Nihil]
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - [Nihil]
- f. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi dan Penanganan Konflik Sosial.
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - [Nihil]
- 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, faktor penyebab terpenuhinya dan faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah kurangnya SDM yang mengerti/menguasai kegiatan tersebut sehingga program/kegiatan tersebut tidak dapat terrealisasi sebagaimana mestinya;
 - Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah kurangnya anggaran akibat refocusing;
 - Faktor dari dapat terpenuhinya realisasi program/kegiatan yaitu pada dasarnya program/kegiatan tersebut merupakan program/kegiatan lanjutan sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

- Faktor penyebab dari realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada.
4. Target capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Terjadinya implikasi terhadap target capaian program/kegiatan yang didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dimana program/kegiatan yang tidak terdapat didalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro harus tetap terealisasi pada APBD Kota Metro.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan yang harus diambil agar hal seperti ini dapat diminimalisir adalah pada saat perencanaan agar direncanakan secara matang sehingga pada saat telah masuk didalam tahap penganggaran tidak terjadi adanya kegiatan yang tidak terealisasi atau bahkan dapat melebihi dari target dan tentunya hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi APBD Kota Metro serta Situasi dan Kondisi yang terjadi di luar perkiraan atau Situasi dan Kondisi yang tak terduga.

Salah satu faktor penentu suksesnya pembangunan di Kota Metro tidak terlepas dari kinerja dan pelayanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Kota Metro. Sampai dengan saat ini kinerja dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada prinsipnya tidak terlepas dari peran serta dari semua pihak.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro seperti pelaksanaan verifikasi terhadap Partai Politik di tingkat Kota Metro bagi Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu Legislatif, Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan di Kota Metro, yang dibebankan kepada APBD Kota Metro, Pelaksanaan Sosialisasi Narkoba Terhadap Siswa dan Masyarakat, Serta Penanganan Konflik Sosial, Untuk lebih

jelasnya analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesbang dan Politik Kota Metro dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaga Teknis Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi) dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi) dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya , pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras , dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan bangsa Dan Politik;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- d. Pengelolaan perlengkapan , urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Sub Bagian Program Anggaran Dan Keuangan

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan , dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. Mengelola data dan informasi;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. Menyusun laporan kinerja;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi serta pembukuan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kegiatan

Administrasi Kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan urusan persuratan;
- b. Melaksanakan tata usaha pimpinan;
- c. Melaksanakan kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesbangpol;
- e. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan inventaris serta pengelolaan aset badan;
- f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan .

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Metro;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. Pelaksanaan bijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. Pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi

negara , wawasan kebangsaan, dan pembaura kebangsaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Sub Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi , dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas berikut Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,

pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- d. Melakukan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- c. Melakukan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Badan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. Pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

- pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerja sama intelejen, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah;
- f. Menerbitkan ijin Penerbitan Penelitian/ Research/Survey/ KKN/KKL/KKS/PPL; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2 Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang penanganan konflik;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2019 secara hierarki terdiri dari :

- Kepala Badan [Eselon II]
- Sekretaris [Eselon III/a]
 - a. Perencana Ahli Muda (Eselon IV/a)
 - b. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda [Eselon IV/a]
- Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama [Eselon III/b]
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda , Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan [Eselon IV/a]
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda , Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama [Eselon IV/a]
- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat [Eselon III/b]
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda , Bidang Politik Dalam Negeri [Eselon IV /a]
 - b. Kepala Sub Bidang , Bidang Organisasi Kemasyarakatan [Eselon IV/a]
- Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - a. Analis Kebijakan , Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen [Eselon IV/a]
 - b. Kepala Sub Bidang , Bidang Penanganan Konflik [Eselon IV/a]

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

No	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2024 (tahun n-1)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2024 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2		3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%	12	13		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	8 0 1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	2230	16.164.079.883	1184	6.233.566.378	383	3.348.193.713	12	1.961.343.612	3%	59%	1.19 6	8.194.909.990	51%			
	8 0 1	0 1	0 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Kesbangpol	31	165.586.640	12	49.984.000	6	42.512.000	2	17.853.000	33%	42%	14	67.837.000	41%		
	8 0 1	0 1	0 1	2.01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja 2024	6	36.225.000	2	11.400.000	1	7.940.000	-	1.916.500	0%	24%	2	13.316.500	37%	
	8 0 1	0 1	0 1	2.01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA OPD	5	48.002.640	4	20.384.000	1	8.724.000	-	-	0%	0%	4	20.384.000	42%	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0 1	0 1	2.01	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD	Jumlah RKAP OPD	5	27.618.640			1	8.724.000	1	-	100 %	0%	1	-		0%	
8	0 1	0 1	2.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2023	5	31.425.000	2	6.600.000	1	7.940.000	1	7.324.500	100 %	92%	3	13.924.500		44%	
8	0 1	0 1	2.01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD Tahun 2023	10	41.590.000	4	11.600.000	2	9.184.000		8.612.000	0%	94%	4	20.212.000		49%	
8	0 1	0 1	2.02		Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	135	13.328.635.193	54	5.264.867.153	27	2.843.426.253	5	1.736.675.612	19%	61%	59	7.001.542.765		53%	
8	0 1	0 1	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	12.067.217.846	28	4.928.192.153	14	2.322.368.253	3	1.489.161.212	21%	64%	31	6.417.353.365		53%	
8	0 1	0 1	2.03	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	1.226.410.547	24	329.075.000	12	512.788.000	2	247.514.400	17%	48%	26	576.589.400		47%	
8	0 1	0 1	2.02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	5	35.006.800	2	7.600.000	1	8.270.000	0	-	0%	0%	2	7.600.000		22%	
8	0 1	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361	164.568.000	357	112.659.000	-	50.352.000	-	48.864.000	#DI V/0!	0%	357	161.523.000		98%	
8	0 1	0 1	2.05	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	74	29.568.000	72	24.060.000	-	20.352.000	-	20.304.000	#DI V/0!	0%	72	44.364.000		150%	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	8	0	1	0	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan		250	95.000.000	250	88.599.000	-	-	-	#DI V/0!	0%	250	88.599.000	93%		
	8	0	1	0	2.05	1	Bimbing Teknis Implementasi peraturan perundangan-Undangan		37	40.000.000	35	40.000.000	-	30.000.000	-	28.560.000	#DI V/0!	0%	35	68.560.000	171%	
	8	0	1	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	230	1.346.798.786	152	410.581.721	60	243.525.000	3	80.241.074	5%	33%	155	490.822.795	36%	
	8	0	1	0	2.06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	70	33.860.000	28	13.993.000	14	6.000.000	-	2.811.000	0%	47%	28	16.804.000	50%	
	8	0	1	0	2.06	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	415.322.130	20	68.455.000	1	54.818.000	-		0%	0%	20	68.455.000	16%	
	8	0	1	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	460.959.238	60	148.958.900	5	70.442.000	-	33.784.700	0%	48%	60	182.743.600	40%	
	8	0	1	0	2.06	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	154.264.858	16	58.031.800	3	24.478.000	-	11.748.820	0%	48%	16	69.780.620	45%	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	8	0	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	50.657.400	16	17.640.000	7	13.140.000	-	4.665.000	0%	36%	16	22.305.000	44%		
	8	0	0	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	497.900.290	12	103.503.021	30	74.647.000	3	27.231.554	10%	36%	15	130.734.575	26%		
	8	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Aderah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	3	13.128.000	3	-	-	-	2		#DI V/0!	0%	5	-	0%	0%	
	8	0	0	2.07	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kantor Kerja	3	13.128.000	3	13.128.000	0	-	-	-	#DI V/0!	0%	3	13.128.000	100%		
	8	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1345	282.805.465	538	86.804.504	257	47.609.460	-	22.096.926	0%	46%	538	108.901.430	39%		
	8	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Untuk Surat-menyurat Kantor	1275	13.540.500	510	5.100.000	255	2.550.000	-	750.000	0%	29%	510	5.850.000	43%		
	8	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	10	234.308.424	4	64.699.704	2	45.059.460	-	21.346.926	0%	47%	4	86.046.630	37%		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0 1	0 1	2.08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Izin Penelitian yang di keluarkan	60	30.000.000	24	17.004.800	0	-	-	-	#DI V/0!	0%	24	17.004.800		57%		
8	0 1	0 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD pada Kesbangpol	125	862.557.800	68	308.670.000	33	120.769.000	2	55.613.000	6%	46%	70	364.283.000		42%		
8	0 1	0 1	2.09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	30	476.519.400	12	179.480.000	6	102.130.000	2	41.568.000	33%	41%	14	221.048.000		46%		
8	0 1	0 1	2.09	0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	30	2.480.000	30	2.480.000	0	-	-	-	#DI V/0!	0%	30	2.480.000		100%		
8	0 1	0 1	2.09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	45.798.400	24	17.200.000	26	8.640.000	-	4.195.000	0%	49%	24	21.395.000		47%		
8	0 1	0 1	2.09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	337.760.000	2	109.510.000	1	9.999.000	-	9.850.000	0%	99%	2	119.360.000		35%		
8	0 1	0 2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	1.460.264.208	32	355.400.806	124	1.123.130.800	-	173.797.050	0%	15%	32	529.197.856		36%		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi dan Upacara HUT di Kota Metro	80	1.460.264.208	32	355.400.806	124	1.123.130.800	-	173.797.050	0%	15%	32	529.197.856	36%	
8	0	0	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5	466.958.194	2	117.726.000	5	32.202.800	-	5.450.000	0%	17%	2	123.176.000	26%	
8	0	0	2	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	15	700.854.318	6	120.713.606	107	1.054.382.000	-	168.347.050,00	0%	16%	6	289.060.656	41%	
8	0	0	2	2.01	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	60	292.451.696	24	116.961.200	12	36.546.000	-	-	0%	0%	24	116.961.200	40%	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Percentase Peserta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	2635	1.998.462.336	1054	269.552.500	712	14.111.469.418	-	12.230.539.618	0%	87%	1.05 4	12.500.092.11 8	625%		
8	0	0	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2635	1.998.462.336	1054	269.552.500	712	14.111.469.418	-	12.230.539.618	0%	87%	1.05 4	12.500.092.11 8	625%		
8	0	0	3	2.01	0 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	15	773.625.816	6	103.404.400	400	-	-	-	0%	#DIV/0!	6	103.404.400	13%	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	3	2.01	0	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	120	617.786.385	48	86.778.100	300	13.861.469.418	-	12.118.174.068	0%	87%	48	12.204.952.16	8	1976%		
8	0	0	3	2.01	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500	607.050.135	1000	79.370.000	12	250.000.000	-	112.365.550	0%	45%	1.00	191.735.550		32%		
	8	0	0	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif	475	5.068.362.722	190	1.820.666.300	62	1.531.199.000	-	1.140.486.250	0%	74%	190	2.961.152.550		58%		
	8	0	0	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas	475	5.068.362.722	190	1.820.666.300	62	1.531.199.000	-	1.140.486.250	0%	74%	190	2.961.152.550		58%		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	4	2.01	0	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125	4.909.541.348	50	1.774.666.300	50	1.513.526.900	-	1.140.336.250	0%	75%	50	2.915.002.550		59%		
8	0	0	4	2.01	0	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	350	158.821.374	140	46.000.000	12	17.672.100	-	150.000	0%	1%	140	46.150.000		29%		
8	0	0	5				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Presentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	70	595.951.260	28	222.261.600	80	127.557.600	-	23.157.250	0%	18%	28	245.418.850		41%		
8	0	0	5	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70	595.951.260	28	222.261.600	80	127.557.600	-	23.157.250	0%	18%	28	245.418.850		41%		
8	0	0	5	2.01	0	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60	447.613.400	24	167.181.200	50	37.491.400	-	23.157.250,00	0%	62%	24	190.338.450		43%		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	5	2.01	0	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	287.937.200	4	55.080.400	30	90.066.200	-		0%	0%	4	55.080.400		19%		
	8	0	0	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentasi Penanganan Konflik Sosial	145	6.348.373.903	58	933.697.500	78	1.333.696.800	-	214.496.950	0%	16%	58	1.148.194.450		18%		
	8	0	0	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rencana Aksi Terpadu yang disusun dan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	145	6.348.373.903	58	933.697.500	78	1.333.696.800	-	214.496.950	0%	16%	58	1.148.194.450		18%		
	8	0	0	6	2.01	0	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaa Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaa Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	5	776.135.500	2	307.404.500,00	12	75.284.400	-	31.809.550	0%	42%	2	339.214.050		44%	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2.01	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	60	1.441.350.900	24	18.235.000,00	50	-	-	-	0%	#DIV/0!	24	18.235.000	1%
8	0	0	2.01	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	60	578.929.053	24	302.665.000	12	86.484.900	-	38.924.000	0%	45%	24	341.589.000	59%
8	0	0	2.01	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20	1.642.144.600	8	305.393.000	4	1.171.927.500	-	143.763.400	0%	12%	8	449.156.400	27%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								31.635.494.312	2.546	9.835.145.084	1439	21.575.247.331	12	15.743.820.730	3%	269%	2.55	25.578.965.81	81%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan indikator kinerja ada 11 indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Untuk mengetahui capaian target kinerja maka dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja dengan menbandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil wali kota metro untuk melihat pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Metro

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Peningkatan Kerukunan beragama	-	-	80%	80%	80%	90%	80%		
2	Jumlah peserta sosialisasi yang paham Terhadap Bahaya Narkoba	-	-	100 pese rta	100 pese rta	100 pese rta	100 pesert a	100 pese rta		
3	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan	-	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %		

	Perundang-Undangan											
4	Persentase Jumlah Ormas yang melaksanakan fungsi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %				
5	Persentase Penanganan Konflik Sosial	-	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap peningkatan politik dan keamanan Kota Metro.
- Peningkatan konflik sosial isu ini semakin hangat dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
- Pencegahan timbulnya paham radikalisme dan terorisme menjadi perhatian serius dan perlu penanganan yang lebih konfrehensip di Kota Metro.
- Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak teknologi dan imformasi.
- Terjadinya tindak kriminalitas narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pejabat, PNS, THL, mahasiswa dan pelajar serta masyarakat di Kota Metro.
- Stabilitas politik didaerah dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, stabilitas politik didaerah sangat tergantung pada peranan Partai Politik, Ormas, LSM dan Yayasan sehingga organisasi-organisasi perlu dirangkul sehingga terjadi hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Organisasi Politik, Ormas, LSM dan Yayasan.

- Konflik yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan serta ketentraman dan ketertiban di Kota Metro perlu penanganan secara dini
- Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, seiring dengan pengaruh kebebasan dan kebebasan dalam ruang demokrasi masyarakat Kota Metro semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila
- Munculnya Polarisasi politik masyarakat menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2025 yang disebabkan oleh praktik politisasi sara, kampanye hitam / hoax, kampanye negative dan politik identitas.
- Politik Pragmatik masyarakat menjelang Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2025.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro berharap agar semua pihak yang berkepentingan dapat berperan serta secara aktif didalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat dan antar aparatur pemerintah.

Diharapkan dimasa yang akan datang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada semua pihak, baik partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat

Tantangan-tantangan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai berikut :

1. Terjadi sengketa/konflik intern ormas maupun partai politik.
2. Kurangnya pembinaan terhadap partai politik dan ormas.
3. Semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba baik dikalangan PNS, pelajar dan masyarakat.

4. Semakin berkurangnya pemahaman terhadap ideologi pancasila, kurang rasa patriotisme kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Di Era Globalisasi ini semakin berkurang pemahaman tentang Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.
6. Adanya terorisme dan paham radikalisme yang masuk di Kota Metro.

Peluang-peluang yang ada sebagai berikut :

1. Dengan melibatkan FORKOPIMDA ,Kominda, FKDM, dan ormas-ormas yang mendapatkan hibah maka semakin terbantu dalam mengatasi Keamanan,Ketentraman dan Ketertiban, serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ada di Kota Metro.
2. Setelah terbentuknya FKUB yang ada di Kota Metro dan Badan Kesbangpol akan semakin banyak berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) akan membuat semakin aktif dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat toleransi antar umat beragama maka akan tercapai masyarakat Kota Metro yang hidup rukun dan damai.
3. Semakin banyak berkoordinasi dengan FKDM maka konflik-konflik yang terjadi bisa teratasi secara dini.
4. Dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BNN Kota Metro maka akan tercapainya Kota Metro bersih narkoba.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dalam bahasa Indonesia berarti tujuan atau meninjau. Review juga dapat berarti ulasan atau mengulas, agar lebih jelasnya review adalah sebuah kegiatan menulis untuk memberikan ulasan/tujuan pada sebuah artikel agar diketahui kelebihan, kekurangan dan kualitasnya.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah rancangan awal yang berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025. Rancangan awal ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai

dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada dasarnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diturunkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 diubah kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana rencana program, kegiatan dan sub. kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi interen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta eksteren yaitu organisasi kemasyarakatan, LSM, partai politik , forum keagamaan, Forkopimda, Kominda ,FPK, dan FKDM.

Untuk lebih jelasnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang ada untuk Tahun 2025 tidak ada Perubahan dan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaia n	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Loka si	Indikato kinerjar	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Metro	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	3.914.119.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Metro	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	3.914.119.950		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	6 Dokumen	42.760.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Evaluasi	6 Dokumen	42.760.000		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

			Daerah					Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Renja 2025	1 Dokumen	7.748.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Renja 2023	1 Dokumen	7.748.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Kota Metro	Tersusunnya RKA OPD	1 Dokumen	7.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	Tersusunnya RKA dan OPD	1 Dokumen	7.100.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD	Kota Metro	Tersusunnya RKAP OPD	1 Dokumen	7.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD	Kota Metro	Tersusunnya RKAP OPD	1 Dokumen	7.100.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LKPJ tahun 2021	1 Dokumen	7.800.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LKPJ tahun 2021	1 Dokumen	7.800.000,-		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPPD tahun 2025	2 Dokumen	13.012.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPPD tahun 2025	2 Dokumen	13.012.000		
Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	3.430.074.990	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	3.430.074.990		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	28 ASN	2.872.314.990	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	28 ASN	2.872.314.990		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	16 orang	550.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	16 orang	550.500.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	7.260.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	7.260.000		
Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiian	100%	17.380.000	Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiian	100%	17.380.000		
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari	Kota Metro	Terbelinya Seragam Olahraga	40 Seragam	17.380.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kota Metro	Terbelinya Seragam Olahraga	40 Seragam	17.380.000		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	hari tertentu										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Umum	100 %.	255.885.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Umum	100 %.	255.885.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kota Metro	Tersedianya Komponen Instalasi Kantor.	14 Jenis	6.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kota Metro	Tersedianya Komponen Instalasi Kantor.	14 Jenis	6.000.000,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	51.085.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	51.085.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor,Jasa Perbaikan Peralatan Elektronik Kantor, Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman Kantor.	5 paket	80.182.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor,Jasa Perbaikan Peralatan Elektronik Kantor, Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman Kantor.	5 paket	80.182.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Metro	Tersedianya Spanduk, Barang Cetakan dan Penggandaan.	3 paket	26.389.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Metro	Tersedianya Spanduk, Barang Cetakan dan Penggandaan.	3 paket	26.389.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro	Tersedianya Surat Kabar Harian dan Mingguan	7 dokumen	13.140.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro	Tersedianya Surat Kabar Harian dan Mingguan	7 dokumen	13.140.000	
	Penyelenggaran Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	30 Perjalanan	79.089.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	30 Perjalanan	79.089.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Tersedianya Jasa Penunjang	12 Bulan	47.609.460	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Tersedianya Jasa Penunjang	12 Bulan.	47.609.460	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	Tersedianya Materai Untuk Surat Menyurat	255 lembar	2.550.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	Tersedianya Materai Untuk Surat Menyurat	255 lembar	2.550.000,-	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

			Kantor				Kantor			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro	Terbayarnya Listrik dan Internet Kantor	2 Jenis	45.059.460,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro	Terbayarnya Listrik dan Internet Kantor	2 Jenis	45.059.460,-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	12 Bulan	120.410.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	12 Bulan	120.410.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Kota Metro	Terbayarnya Pajak kendaraan roda 4 dan roda 2, Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4, Terpeliharanya kendaraan Dinas.	6 Unit, 2 Mobil,4 Motor	102.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Kota Metro	Terbayarnya Pajak kendaraan roda 4 dan roda 2, Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4, Terpeliharanya kendaraan Dinas.	6 Unit, 2 Mobil,4 Motor	102.130.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro	Servis Komputer, Laptop.	26 Unit	8.280.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro	Servis Komputer, Laptop.	26 Unit	8.280.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Metro	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000,-	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Metro	Terpelihara ny Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000,-	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Metro	Percentase Sekolah yang di berikan Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	100 %	1.182.013.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Metro	Meningkatnya pengetahuan tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Keabngsaan	100 %	1.182.013.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Metro	Terlaksananya Pemantapan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	12 Bulan	1.182.013.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Metro	Meningkatnya pengetahuan tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Keabngsaan	12 Bulan	1.182.013.000	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan ,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Tercapainya Program Peningkatan SDM Aparatur Badan Kesbangpol Kota Metro.	5 dokumen	56.201.400	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan ,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Tercapainya Program Peningkatan SDM Aparatur Badan Kesbangpol Kota Metro.	5 dokumen	56.201.400	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Ideologi Wasbang	100 orang	16.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Upacara HUT RI, HUT Propinsi dan HUT Kota Metro.	100 orang	16.500.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Terselenggaranya Operasional Kegiatan FPK dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan.	12 laporan	35.811.600	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Terselenggaranya Operasional Kegiatan FPK dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan.	12 laporan	35.811.600	
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka	Kota Metro	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka	12 laporan	377.400.800	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka	Kota Metro	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka	12 laporan	377.400.800	
Pembentukan paskibraka	Kota Metro	Jumlah anggota paskibraka	31 orang	622.599.200	Pembentukan paskibraka	Kota Metro	Jumlah anggota paskibraka	31 orang	622.599.200	
Pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	Kota Metro	Jumlah laporan Pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	12 laporan	-	Pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	Kota Metro	Jumlah laporan Pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	12 laporan	-	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

			pancasila				pancasila			
Pelaksanaan tugas purnapaskibra ka duta panchasila	Kota Metro	Jumlah laporan Pelaksanaan tugas purnapaskibra ka duta panchasila	12 laporan	-	Pelaksanaan tugas purnapaskibra ka duta panchasila	Kota Metro	Jumlah laporan Pelaksanaan tugas purnapaskibra ka duta panchasila	12 laporan	-	
Pengangkatan purnapaskibra ka duta panchasila	Kota Metro	jumlah purnapaskibra ka duta panchasila	31 orang	73.500.000	Pengangkatan purnapaskibra ka duta panchasila	Kota Metro	jumlah purnapaskibra ka duta panchasila	31 orang	73.500.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Metro	Percentase Peserta Pendidikan Politik bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, LSM.	100 %	140.257.800	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Metro	Percentase Peserta Pendidikan Politik bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, LSM.	100 %	140.257.800	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik .	Kota Metro	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	100%	140.257.800	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Metro	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	100%	140.257.800	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Kota Metro	Jumlah peserta pendidikan pemilu bagi partai politik, pemilih pemula, kelompok masyarakat Ormas, LSM, dan Perpuuan. h	150 Peserta	40.426.100	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Kota Metro	Jumlah peserta pendidikan pemilu bagi partai politik, pemilih pemula, kelompok masyarakat Ormas, LSM, dan	150 Peserta	40.426.100	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Rapat K			Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Perempuan.			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan DEMokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah , Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kota Metro	Jumlah oramg yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik didaerah	300 orang	44.426.100	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan DEMokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah , Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kota Metro	Jumlah oramg yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik didaerah	300 orang	44.426.100	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan DEMokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah , Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kota Metro	Jumlah laporan Monitoring,Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik didaerah	12 laporan	55.690.700	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan DEMokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah , Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kota Metro	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik didaerah	12 laporan	55.690.700	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta , 12 ormas penerima hibah, 25 ormas	1.432.506.700	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta, 12 ormas penerima hibah, 25 ormas tedaftar, 70 ormas	1.432.506.700	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

				tedaftar , 70 ormas sengketa				sengketa		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta , 12 ormas penerima hibah, 25 ormas tedaftar , 70 ormas sengketa	1.432.506.700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta, 12 ormas penerima hibah, 25 ormas tedaftar, 70 ormas sengketa	1.432.506.700	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	Kota Metro	Jumlah ormas yang mengikuti Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	50 ormas	1.346.881.200	Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	Kota Metro	Jumlah ormas yang mengikuti Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	50 ormas	1.346.881.200	
Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	Kota Metro	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	30 ormas	46.732.500	Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	Kota Metro	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah	30 ormas	46.732.500	
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran	Kota Metro	Jumlah laporan hasil monitoring dibidang pendaftaran ormas,	12 laporan	38.893.000	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran	Kota Metro	Jumlah laporan hasil monitoring dibidang pendaftaran	12 laporan	38.893.000	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah		pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah			ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah		ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	83.048.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	83.048.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	83.048.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	83.048.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah	Kota Metro	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah	50 orang	38.666.400	Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah	Kota Metro	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah	50 orang	38.666.400	
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,	Kota Metro	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di bidang	30 orang	44.381.600	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social	Kota Metro	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di bidang	30 orang	44.381.600	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah		ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah			budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah		ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	12 buku laporan , 12 buku laporan , 12 buku laporan , 4 kali	1.324.959.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	12 buku laporan , 12 buku laporan , 12 buku laporan , 4 kali	1.324.959.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	12 buku laporan , 12 buku laporan , 12 buku laporan , 4 kali	1.324.959.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	12 buku laporan , 12 buku laporan , 12 buku laporan , 4 kali	1.324.959.000	
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Metro	Jumlah kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	12 dokumen	62.987.400	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Metro	Jumlah kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	12 dokumen	62.987.400	

Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Metro	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	50 orang	-	Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Metro	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	50 orang	-	
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Metro	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	12 laporan	86.477.300	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Metro	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	12 laporan	86.477.300	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.175.494.300	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.175.494.300	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tingkat nasional reformasi telah memicu terjadinya percaturan atau pergolakan politik nasional, beberapa hal pokok yang menonjol terkait dengan reformasi tersebut antara lain : demokrasi, disintegrasi, desentralisasi dan debirokratisasi. Konsep NKRI sudah merupakan harga mati bagi bangsa

Indonesia. Namun demikian, jika tidak diwaspada dengan cermat maka disintegrasi bangsa masih mungkin terjadi terutama melalui celah isu-isu SARA dan kesenjangan ekonomi, baik berupa kesenjangan antar wilayah maupun antar golongan.

Ditingkat Provinsi desentralisasi sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan di Daerah telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.

Sejalan dengan semangat desentralisasi sebagai implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri, meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Banyak hal yang menjadi penyebab ketidakoptimalan konsep desentralisasi salah satunya adalah belum dipahaminya jiwa dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut secara utuh.

Nilai demokrasi yang berjalan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat terlihat jelas sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut. Pemilihan Umum baik pemilihan anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung menjadi indikator nyata berjalannya nilai-nilai demokrasi. Selain itu masyarakat juga dituntut untuk dapat memahami dan menjaga nilai-nilai tersebut mulai dari ruang lingkup terkecil yakni rumah tangga sampai dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

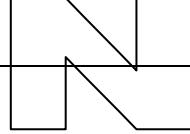
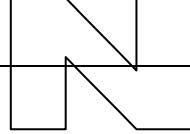
Berbagai kesenjangan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, serta adanya potensi kerawanan sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, kriminalitas, kemiskinan serta aspek lainnya merupakan potensi pemicu konflik yang patut diantisipasi sejak dini.

Walaupun Kota Metro sudah dikenal sebagai daerah yang tenang, aman dan nyaman, akan tetapi tindakan prefentif perlu selalu dilakukan, agar berbagai gangguan yang dapat merusak keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kota Metro tersebut dapat dihindari.

Rasa aman masyarakat yang sedikit terganggu akibat tindak kejahatan seperti pencurian, perampukan dan penodongan perlu disikapi dengan baik untuk itu perlu dilakukan kerjasama antara pihak Pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat dan Aparat Kepolisian, karena gangguan ketentraman, ketertiban bukan semata-mata berasal dari dalam saja, akan tetapi bisa saja berasal dari luar daerah.

Untuk Program / Kegiatan tahun anggaran 2025 yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota untuk sementara ini tidak ada.

Tabel T – C .32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1		 		 	
2		 		 	
3					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang saat ini adalah RPJMN 2020 – 2024. Selain itu sesuai dengan pasal 12 ayat (2) permendagri 86 tahun 2017 disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

Visi Kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa" Dengan Misi :

- a. Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

- d. Mendorong terwujudnya keserasihan dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public
- f. Dalam mendukung misi pertama yaitu : Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri dan tujuan strategis : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara dengan sasaran strategis :
 - Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
 - Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

Serta dengan melihat Visi Pembangunan Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 sesuai dengan visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah Rakyat Lampung Berjaya.

Visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas social, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenang tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman

- juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
 3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan public yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
 4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Misi 2 : Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

Misi 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam tingkat nasional reformasi telah memicu terjadinya percaturan atau pergolakan politik nasional, beberapa hal pokok yang menonjol terkait dengan reformasi tersebut antara lain : demokrasi, disintegrasi, desentralisasi dan debirokratisasi. Konsep NKRI sudah merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, jika tidak diwaspadai dengan cermat maka disintegrasi bangsa masih mungkin terjadi terutama melalui celah isu-isu SARA dan kesenjangan ekonomi, baik berupa kesenjangan antar wilayah maupun antar golongan.

Ditingkat Provinsi desentralisasi sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan di Daerah telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.

Sejalan dengan semangat desentralisasi sebagai implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri, meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Banyak hal yang menjadi penyebab ketidakoptimalan konsep desentralisasi salah satunya adalah belum dipahaminya jiwa dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut secara utuh.

Nilai demokrasi yang berjalan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat terlihat jelas sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut. Pemilihan Umum baik pemilihan anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung menjadi indikator nyata berjalannya nilai-nilai demokrasi. Selain itu masyarakat juga dituntut untuk dapat memahami dan menjaga nilai-nilai tersebut mulai dari ruang lingkup terkecil yakni rumah tangga sampai dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai kesenjangan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, serta adanya potensi kerawanan sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, kriminalitas, kemiskinan serta aspek lainnya merupakan potensi pemicu konflik yang patut diantisipasi sejak dini.

Walaupun Kota Metro sudah dikenal sebagai daerah yang tenang, aman, nyaman dan kondusif, akan tetapi tindakan preventif perlu selalu dilakukan, agar berbagai gangguan yang dapat merusak keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kota Metro tersebut dapat dihindari.

Rasa aman masyarakat yang sedikit terganggu akibat tindak kejahatan seperti pencurian, perampukan dan penodongan perlu disikapi dengan baik untuk itu perlu dilakukan kerjasama antara pihak Pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat dan Aparat kepolisian, karena gangguan ketentraman, ketertiban bukan semata-mata berasal dari dalam saja, akan tetapi bisa saja berasal dari luar daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro adalah “**Terwujudnya stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan bangsa**” dan **Sasaran** dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro adalah “**Mewujudkan stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan bangsa**”,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan bidang urusan pemerintahan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya unsur penunjang dan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mengampu Misi 1 dan Misi 5 terdapat di dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari 5 Indikator, tetapi 5 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tidak masuk dalam RPJMD maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mempunyai tujuan dan sasaran strategis serta Indikator capaiannya dan target yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021-2026. Apabila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro melakukan penyesuaian rumusan sasaran pada Bab III rancangan Renja dengan sasaran pada Bab IV RKPD maka tidak akan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yang menjadi tujuan dari pada Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sesuai dengan isu aktual yang dihadapi saat ini, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro menyusun program kerja dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan mempedomani regulasi terbaru yaitu keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 yang telah diubah kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini merupakan program umum yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Adapun Kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kondisi masyarakat Kota Metro yang beragam baik suku, ras, agama, adat istiadat, kebudayaan baik warga asli maupun warga pendatang serta warga keturunan disamping sebagai khasanah kekayaan bangsa juga kondisi ini merupakan potensi / ancaman terjadinya konflik horisontal di masyarakat. Di Kota Metro meskipun belum pernah terjadi konflik yang meluas di masyarakat, konflik yang bernuansa agama pernah beberapa kali terjadi, untuk mencegah terjadinya konflik bisa tumbuh meluas di masyarakat maka perlu dikembangkan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat dan aparatur pemerintah secara terus menerus.

Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat dan aparatur pemerintah, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

- Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
 - Pembentukan paskibraka
 - Pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila
 - Pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila
 - Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Stabilitas politik di daerah Kota Metro sangat tergantung pada peranan Pemerintah, Partai Politik, Ormas, Orpol LSM dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menumbuhkembangkan partisipasi politik masyarakat sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memberikan kontrol dan dukungan kepada Pemerintah. Tinggi dan rendahnya kontrol, dukungan dan partisipasi politik masyarakat tergantung pada tingkat pendidikan politik masyarakat, dan tingkat pendidikan politik masyarakat akan menentukan pelaksanaan demokratisasi di daerah.

Agen-agen pendidikan politik harus lebih diperankan kembali, komunikasi dua arah antara Pemerintah dan lembaga non Pemerintah harus dibangun. Apabila lembaga-lembaga politik sudah berperan sesuai dengan fungsinya maka stabilitas politik di daerah akan dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik di masyarakat kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi organisasi Kemasyarakatan di masyarakat, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban serta pencegahan tindakan kriminal di masyarakat dituntut kemampuan aparat terkait seperti dari unsur Pol. PP, POLRI,

TNI dan Kejaksaan mengadakan kerjasama. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat terwujudnya pola yang jelas dan searah dalam memelihara dan meningkatkan serta mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal di masyarakat. Kerjasama ini dapat berupa saling tukar data dan informasi, koordinasi gerak dan tindakan dilapangan dalam penanganan kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban.

Kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban tidak hanya terbatas pada peristiwa kriminal tetapi juga dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Hasil dari kerjasama ini diharapkan dapat menjadi alat deteksi dini untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di daerah serta dapat dijadikan dasar bagi pimpinan dalam menentukan bahan pertimbangan dan pembuatan kebijakan daerah.

Selain kerjasama tersebut diatas aparatur Kesbang dan Politik diwajibkan mengetahui kondisi daerahnya setiap hari perkembangan-perkembangan apa saja yang terjadi. Adapun kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun jumlah Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan yang akan direncanakan untuk Tahun Anggaran 2025 dan perkiraan maju Tahun Anggaran 2026 sebanyak 6 (enam) Program yang didalamnya terdapat sebanyak 11 (sebelas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan, dengan total kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 8.142.607.323,- dan untuk perkiraan maju Tahun Anggaran 2026 yaitu sebesar Rp. 8.956.868.055,- dan untuk pendanaan kesemuanya berasal dari APBD Kota Metro.

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

NO	KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	8 0 1	0 1	0 1	0 1	6 Dokumen	3.914.119.950	Kota Metro	DAU			6 Dokumen	4.305.531.945			
	8 0 1	0 1	0 1	2 0 1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	42.760.000	Kota Metro	DAU			6 Dokumen	47.036.000		
	8 0 1	0 1	0 1	2 0 1	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.748.000	Kota Metro	DAU			1 Dokumen	8.522.800		
	8 0 1	0 1	0 1	2 0 1	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.100.000	Kota Metro	DAU			1 Dokumen	7.810.000		
	8 0 1	0 1	0 1	2 0 1	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD	1 Dokumen	7.100.000	Kota Metro	DAU			1 Dokumen	7.810.000		
	8 0 1	0 1	0 1	2 0 1	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	7.800.000,-	Kota Metro	DAU			1 Dokumen	8.580.000		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2024	2 Dokumen	13.012.000	Kota Metro	DAU				2 Dokumen	14.313.200
8	0	0	2	0		Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.430.074.990	Kota Metro	DAU				100%	3.773.082.489
8	0	0	2	0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	2.872.314.990	Kota Metro	DAU				28 Orang	3.159.546.489
8	0	0	2	0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	550.500.000	Kota Metro	DAU				12 Dokumen	605.550.000
8	0	0	2	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Laporan	7.260.000	Kota Metro	DAU				1 Laporan	7.986.000
8	0	0	2	0		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	17.380.000	Kota Metro	DAU				100%	19.118.000
8	0	0	2	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang terbeli	40 Seragam	17.380.000	Kota Metro	DAU				40 Seragam	19.118.000
8	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	255.885.500	Kota Metro	DAU				100%	281.474.050

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	14 Jenis	6.000.000,-	Kota Metro	DAU				14 Jenis	6.600.000
8	0	0	2	01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.085.000	Kota Metro	DAU				2 Paket	56.193.500
8	0	0	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	80.182.500	Kota Metro	DAU				5 Paket	88.200.750
8	0	0	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.389.000	Kota Metro	DAU				3 Paket	29.027.900
8	0	0	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	13.140.000	Kota Metro	DAU				7 Dokumen	14.454.000
8	0	0	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	79.089.000	Kota Metro	DAU				30 laporan	86.997.900
8	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47.609.460	Kota Metro	DAU				100%	52.370.406

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Untuk Surat-menyurat Kantor	255 Lembar	2.550.000,-	Kota Metro	DAU				255 Lembar	2.805.000
8	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	2 Rekening	45.059.460,-	Kota Metro	DAU				2 Rekening	49.565.406
8	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD pada Kesbangpol	33 Unit	120.410.000	Kota Metro	DAU				33 Unit	132.451.000
8	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	6 Unit	102.130.000	Kota Metro	DAU				6 Unit	112.343.000
8	0	0	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	8.280.000	Kota Metro	DAU				26 Unit	9.108.000

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	10.000.000,-	Kota Metro	DAU				1 unit	11.000.000
8	0	0	2	0		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.182.013.000	Kota Metro	DAU				100%	1.300.214.300
8	0	0	2	0	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi dan Upacara HUT di Kota Metro	100%	1.182.013.000	Kota Metro	DAU				100%	1.300.214.300
8	0	0	2	0	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5 Dokumen	56.201.400	Kota Metro	DAU				5 Dokumen	61.821.540
8	0	0	2	0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	107 Orang	16.500.000	Kota Metro	DAU				107 Orang	18.150.000

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0 1	0 2	2 0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	12 laporan	35.811.600	Kota Metro	DAU					12 laporan	39.392.760
8	0 1	0 2	2 0 1	07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	12 laporan	377.400.800	Kota Metro	DAU					12 laporan	415.140.880
8	0 1	0 2	2 0 1	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah anggota Paskibraka	31 orang	622.599.200	Kota Metro	DAU					31 orang	684.859.120
8	0 1	0 2	2 0 1	09	Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	12 Laporan	-	Kota Metro	DAU					12 Laporan	-
8	0 1	0 2	2 0 1	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	12 Laporan	-	Kota Metro	DAU					12 Laporan	-
8	0 1	0 2	2 0 1	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	31 orang	73.500.000	Kota Metro	DAU					31 orang	80.850.000
8	0 1	0 3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peserta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	100%	140.257.800	Kota Metro	DAU					100%	154.283.580

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	3	2	0	1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	140.257.800	Kota Metro	DAU						100%	154.283.580					
8	0	0	3	2	0	1	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	400 orang	40.426.100	Kota Metro	DAU						400 orang	44.468.710				
8	0	0	3	2	0	1	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 orang	44.426.100	Kota Metro	DAU						Tidak ada lagi Hibah KPU dan Bawaslu untuk Pemilu dan Pilkada	300 orang	48.555.100			

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	55.690.700	Kota Metro	DAU				12 Laporan	61.259.770
8	0	0	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif	100%	1.432.506.700	Kota Metro	DAU				100%	1.575.757.370
8	0	0	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas	100%	1.432.506.700	Kota Metro	DAU				100%	1.575.757.370
8	0	0	2	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 ormas	1.346.881.200	Kota Metro	DAU				50 ormas	1.481.569.320

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	8	0	0	4	2	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 ormas	46.732.500	Kota Metro	DAU				30 ormas	51.405.750	
	8	0	0	4	2	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	38.893.000	Kota Metro	DAU				12 Laporan	42.782.300	
	8	0	0	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Presentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	80 orang	83.048.000	Kota Metro	DAU				80 orang	91.352.800	
	8	0	0	5	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 orang	83.048.000	Kota Metro	DAU				80 orang	91.352.800	
	8	0	0	5	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 orang	38.666.400	Kota Metro	DAU				50 orang	42.533.040

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	8	0	0	2	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 orang	44.381.600	Kota Metro	DAU					30 orang	48.819.760	
	8	0	0	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentasi Penanganan Konflik Sosial	100%	1.324.959.000	Kota Metro	DAU					100%	1.457.454.900	
	8	0	0	6	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rencana Aksi Terpadu yang disusun dan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	100%	1.324.959.000	Kota Metro	DAU				100%	1.457.454.900	
	8	0	0	6	2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	12 Dokumen	62.987.400	Kota Metro	DAU				12 Dokumen	69.286.140
	8	0	0	6	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang	-	Kota Metro	DAU				50 orang	-

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	6	2	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	86.477.300	Kota Metro	DAU				12 Laporan	95.125.030
8	0	0	6	2	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.175.494.300	Kota Metro	DAU				4 Dokumen	1.293.043.730
						NIHIL										
						J U M L A H		8.076.904.450								8.956.868.055

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) Program yang didalamnya terdapat sebanyak 11 (sebelas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

Untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	8 0 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.914.119.950	Kota Metro	DAU				6 Dokumen	4.305.531.945	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro		
	8 0 1 0 1 2 0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Kesbangpol	6 Dokumen	42.760.000	Kota Metro	DAU				6 Dokumen	47.036.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro		
	8 0 1 0 1 2 0 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja 2025	1 Dokumen	7.748.000	Kota Metro	DAU				1 Dokumen	8.522.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro		
	8 0 1 0 1 2 0 1 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	1 Dokumen	7.100.000	Kota Metro	DAU				1 Dokumen	7.810.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro		
	8 0 1 0 1 2 0 1 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP OPD	1 Dokumen	7.100.000	Kota Metro	DAU				1 Dokumen	7.810.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro		
	8 0 1 0 1 2 0 1 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2024	1 Dokumen	7.800.000,-	Kota Metro	DAU				1 Dokumen	8.580.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2024	2 Dokumen	13.012.000	Kota Metro	DAU				2 Dokumen	14.313.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	02	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.430.074.990	Kota Metro	DAU				100%	3.773.082.489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	2.872.314.990	Kota Metro	DAU				28 Orang	3.159.546.489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	550.500.000	Kota Metro	DAU				12 Dokumen	605.550.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Laporan	7.260.000	Kota Metro	DAU				1 Laporan	7.986.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	17.380.000	Kota Metro	DAU				100%	19.118.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang terbeli	40 Seragam	17.380.000	Kota Metro	DAU				40 Seragam	19.118.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	255.885.500	Kota Metro	DAU				100%	281.474.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	14 Jenis	6.000.000,-	Kota Metro	DAU				14 Jenis	6.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	0	01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.085.000	Kota Metro	DAU				2 Paket	56.193.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	80.182.500	Kota Metro	DAU				5 Paket	88.200.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.389.000	Kota Metro	DAU				3 Paket	29.027.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	13.140.000	Kota Metro	DAU				7 Dokumen	14.454.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	79.089.000	Kota Metro	DAU				30 laporan	86.997.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47.609.460	Kota Metro	DAU				100%	52.370.406	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	8	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Untuk Surat-menyurat Kantor	255 Lembar	2.550.000,-	Kota Metro	DAU					255 Lembar	2.805.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	2 Rekening	45.059.460,-	Kota Metro	DAU					2 Rekening	49.565.406	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD pada Kesbangpol	33 Unit	120.410.000	Kota Metro	DAU					33 Unit	132.451.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	6 Unit	102.130.000	Kota Metro	DAU					6 Unit	112.343.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	8.280.000	Kota Metro	DAU					26 Unit	9.108.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

	8	0	0	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	10.000.000,-	Kota Metro	DAU				1 unit	11.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.182.013.000	Kota Metro	DAU				100%	1.300.214.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi dan Upacara HUT di Kota Metro	100%	1.182.013.000	Kota Metro	DAU				100%	1.300.214.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5 Dokumen	56.201.400	Kota Metro	DAU				5 Dokumen	61.821.540	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
	8	0	0	2	01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	107 Orang	16.500.000	Kota Metro	DAU				107 Orang	18.150.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	2	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	12 laporan	35.811.600	Kota Metro	DAU					12 laporan	39.392.760	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	2	07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	12 laporan	377.400.800	Kota Metro	DAU					12 laporan	415.140.880	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	2	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah anggota Paskibraka	31 orang	622.599.200	Kota Metro	DAU					31 orang	684.859.120	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	2	09	Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	12 Laporan	-	Kota Metro	DAU					12 Laporan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	2	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	12 Laporan	-	Kota Metro	DAU					12 Laporan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	2	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	31 orang	73.500.000	Kota Metro	DAU					31 orang	80.850.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Percentase Peserta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	100%	140.257.800	Kota Metro	DAU					100%	154.283.580	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	3	2	0	1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	140.257.800	Kota Metro	DAU					100%	154.283.580	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro	
8	0	0	3	2	0	1	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	400 orang	40.426.100	Kota Metro	DAU					400 orang	44.468.710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	3	2	0	1	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	300 orang	44.426.100	Kota Metro	DAU					300 orang	48.555.100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	3	2	0	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	55.690.700	Kota Metro	DAU					12 Laporan	61.259.770	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Percentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif	100%	1.432.506.700	Kota Metro	DAU					100%	1.575.757.370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	4	2	0	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas	100%	1.432.506.700	Kota Metro	DAU					100%	1.575.757.370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	4	2	0	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 ormas	1.346.881.200	Kota Metro	DAU					50 ormas	1.481.569.320	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	2	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 ormas	46.732.500	Kota Metro	DAU				30 ormas	51.405.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	2	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	38.893.000	Kota Metro	DAU				12 Laporan	42.782.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Presentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	80 orang	83.048.000	Kota Metro	DAU				80 orang	91.352.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	5	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 orang	83.048.000	Kota Metro	DAU				80 orang	91.352.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	5	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 orang	38.666.400	Kota Metro	DAU				50 orang	42.533.040	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	5	2	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 orang	44.381.600	Kota Metro	DAU					30 orang	48.819.760	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentsasi Penanganan Konflik Sosial	100%	1.324.959.000	Kota Metro	DAU				100%	1.457.454.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro	
8	0	0	6	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rencana Aksi Terpadu yang disusun dan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	100%	1.324.959.000	Kota Metro	DAU				100%	1.457.454.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro	
8	0	0	6	2	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	12 Dokumen	62.987.400	Kota Metro	DAU				12 Dokumen	69.286.140	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro	
8	0	0	6	2	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang	-	Kota Metro	DAU				50 orang	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2025

8	0	0	6	2	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	86.477.300	Kota Metro	DAU				12 Laporan	95.125.030	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
8	0	0	6	2	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.175.494.300	Kota Metro	DAU				4 Dokumen	1.293.043.730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
						NIHIL											
						J U M L A H		8.076.904.450							8.956.868.055		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 merupakan implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam rencana pelaksanaan pembangunan 1 (Satu) tahun kedepan. Rencana Kerja ini memuat tentang program prioritas, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber pembiayaan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Ada Berbagai kesenjangan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, serta adanya potensi kerawanan sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, kriminalitas, kemiskinan serta aspek lainnya merupakan potensi pemicu konflik yang patut diantisipasi sejak dini.
2. Walaupun Kota Metro sudah dikenal sebagai daerah yang tenang, aman, nyaman dan kondusif, akan tetapi tindakan preventif perlu selalu dilakukan, agar berbagai gangguan yang dapat merusak keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kota Metro tersebut dapat dihindari.
3. Rasa aman masyarakat yang sedikit terganggu akibat tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan penodongan perlu disikapi dengan baik.

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya telah diantisipasi sejak dini oleh bidang Wasnas yang merupakan bidang yang menangani tentang kewaspadaan dini untuk turun langsung memonitoring atas kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Metro. Untuk pelaksanaan tersebut perlu melakukan kerja sama antara pihak

Pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat dan Aparat kepolisian, karena gangguan ketentraman, ketertiban bukan semata-mata berasal dari dalam saja, akan tetapi bisa saja berasal dari luar daerah.

Untuk rencana tindak lanjut terhadap kendala pelaksanaan rencana kerja tahun lalu adalah :

1. Melakukan tindakan preventif secara dini untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan
2. Melakukan upaya preventif yang merupakan upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan

Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sebagaimana yang menjadi tujuan kita bersama.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO,

Dra. ROSITA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003151990032001